

Menurut Atho' Mudzor, dalam pemikiran hukum Islam setidaknya ada 4 jenis pemikiran yang saling melengkapi yaitu fikih, Qānūn (perundang-undangan), keputusan peradilan, dan fatwa. Masing-masing dari produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri⁵, dan fatwa mewakili kekhasannya tersendiri.

Senada dengan apa yang diungkapkan Atho' Mudzor, Yūsuf al-Qarḍāwī pun memiliki pandangan hampir sama, bahwa ruang ijtihad memiliki wujud praktisnya. Ijtihad, menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, memiliki beraneka contoh praktis di antaranya keputusan peradilan (*al-qaḍā'*), *taqnīn* (perundang-undangan), kajian fikih (*al-baḥṡ al-fiqh*) serta fatwa⁶.

Oleh karena itu, baik Yūsuf al-Qarḍāwī maupun Atho' Mudzor bersepakat bahwa fatwa menjadi bagian dari dinamikan hukum Islam, yakni sebagai salah satu diskursus pemikiran hukum dalam Islam, juga bagian dari hasil praktis dari proses berijtihad.

Namun, jika mengacu pada kedua pendapat di atas, selain *taqnīn* yang merupakan hukum positif yang tertuang dalam bahasa perundang-undangan, sepintas keberadaan *al-qaḍā'*, *al-fiqh*, dan *al-fatwā* bisa menjadi 3 esensi yang tumpang tindih, bahkan saling bertukar tempat. Namun, Ali Jumat secara cerdas memberikan simulasi contoh mengenai keterpautan ketiga hal tersebut dalam sebuah contoh praktis mengenai keharaman minuman keras. Beliau berkata:

⁵ M. Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Buddy Munawar Rachman (ed), *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 369-270

⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Mujibāt Taghayyur al-Fatwā fī 'Aṣrina, cet.II* (Mesir: Dār al-Shurūq, 2011), 11-12

Untuk lebih memotret sisi perubahan masa, atau lebih tepatnya perubahan prilaku manusia yang timbul di masa tertentu, hadis Riwayat Ibnu Abbas di atas patut dikutip secara lengkap.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْزَى بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ قَالَ وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا فَنَوَخَى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوقَى ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ حَتَّى أَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ قَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ لِمَ تَجْلِدُنِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ. قَالَ : وَفِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنْ لَا أُجْلَدَكَ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) الْآيَةَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ أَنْزَلَتْ عُدْرًا لِلْمَاضِينَ وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ فَعُدْرُ الْمَاضِينَ لِأَنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ وَحُجَّةٌ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ) الْآيَةَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى أَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَاذَا تَرَوْنَ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

Di antara perubahan pengetahuan yang bersifat *shar'i* adalah perubahan pengetahuan tentang status hadis tertentu. Semisal seorang pakar agama mengeluarkan fatwa dengan melandasi hadis tertentu, namun kemudian setelah melalui uji klarifikasi dan validitas hadis ternyata diketahui bahwa hadis tersebut lemah, maka fatwa pun akan berubah. Atau sebaliknya, orang yang berfatwa menilai hadis tersebut lemah (*da'if*) pada masalah tertentu namun kemudian ditemui dan menjadi kokoh bahwasanya hadis tersebut memiliki validitas yang diakui, maka fatwa pun bisa menjadi berubah akibat perubahan pengetahuan mengenai status hadis.

Sementara perubahan pengetahuan yang berkaitan dengan peristiwa kontemporer di antaranya adalah hukum merokok dan masa mengandung (*muddat al-haml*). Pada mulanya, pengetahuan yang terbatas menyebabkan munculnya beragam fatwa mengenai status hukum merokok. Ada ulama yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, dan ada pula yang menghukumi mubah. Bahkan dalam masalah ini, status hukum merokok ada yang sampai melabeli dengan 5 hukum yang berbeda dengan argumentasi yang berbeda.

Saeiring dengan perkembangan pengetahuan kontemporer, semua dokter bersepakat bahwa merokok adalah perilaku yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Atas pertimbangan, argumentasi, dan penjelasan ilmiah dalam bidang medis, secara perlahan pengetahuan ini menyadarkan kembali tentang bahaya merokok pada kesehatan seseorang.

Melakukan tindakan yang membahayakan diri atau kesehatan diri sendiri atau orang lain merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Maka dengan menggunakan prinsip, misalnya, dalam Surat al-Nisa ayat 29 mengenai larangan

dimiliki akan mampu memenuhi beberapa kebutuhan yang tidak terdapat dalam rumah sewa. Hal inilah yang menjadi kebutuhan manusia modern saat ini, terlebih di dunia Barat.

Kebutuhan akan rumah ini bukan saja untuk tempat menetap, di mana penghuni tidak merasa dikontrol bahkan diusir oleh pemilik rumah sewa, namun juga untuk memberikan status sosial yang lebih baik di masyarakat. Karena memiliki rumah sendiri akan –sedikit banyak- mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, pandangan dan status sosial yang baik.

Namun, seringkali untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, seorang muslim membutuhkan biaya tambahan yang digunakan untuk membeli rumah dengan melakukan pinjaman di bank. Pinjaman ini menjadikan seseorang tersebut berhutang dengan kewajiban membayar secara rutin selama batas waktu tertentu.

Terkait dengan kebutuhan ini pula, Majelis Fatwa Eropa (*al-Majlis al-Urūby li al-Iftā'*) memerikan fatwa mengenai kebolehan orang Islam membeli rumah untuk tempat tinggal melalui bank yang bersistem riba, di mana seseorang akan memiliki kewajiban untuk membayar (mencicil) rumah tiap bulan dengan angsuran tiap bulan untuk pembelian rumah yang dijual padanya secara tempo (*al-ajal*). Salah satu hal yang menjadi pertimbangan syariat atas munculnya fatwa ini adalah kadar kebutuhan yang kuat bagi orang Islam (untuk memiliki tempat tinggal) yang bisa ditempatkan di posisi darurat. Hal ini pula yang dapat ditemukan dalam kaidah *al-Hājat tanzilu manzilat al-ḍarūrah khāṣṣatan kānat au 'āmmatan* (kebutuhan itu dapat menempati tempatnya darurat baik secara khusus maupun secara umum).

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, kemampuan manusia di bidang telekomunikasi seakan menjadi kian lebih baik, canggih dan sangat cepat.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan komunikasi (*taṭawwur al-istiṣālāt*), kemampuan manusia untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan memberitahukan waktu kedatangan seseorang ke rumah, misalnya, tentu dapat menghilangkan keterkejutan atau perangsa sedang diintai bagi istri atau keluarganya.

Maka, di sini urgencies kajian kita menemui titik terang, bahwa kemampuan manusia yang kian berkembang dengan lebih baik, akan menjadi salah satu instrumen yang menyebabkan fatwa hukum memiliki jawaban yang berbeda.

- h. Perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik, (*al-auḍā' al-ijtimā'iyah, wa al-iqtisādiyyah, wa al-siyāsiyah*)

Dalam merespon realita hukum seringkali fatwa juga tidak bisa dikesampingkan dengan realita sosial di mana masyarakat hidup, dengan realita ekonomi di mana masyarakat mencukupi kebutuhan hidup, serta dengan realita politik di mana masyarakat diatur kehidupannya.

Fatwa yang terbentuk akibat suatu kondisi sosial tertentu, keadaan perekonomian tertentu, atau situasi politik tertentu, tentu saja akan memiliki fleksibilitas untuk berubah manakala unsur dan instrumen yang membentuk fatwa tersebut juga berubah. Perubahan ini pada tataran berikutnya akan memberikan warna dan corak tertentu dalam fatwa.

Kendati terkadang informasi tekstual tidak berubah, namun perubahan pemikiran seringkali terjadi akibat, di antaranya, keluasan ilmu pengetahuan yang dikuasai, pembelajaran yang telah dilalui di lembaga pendidikan yang beragam, hasil interaksi dengan orang lain.

Begitu juga, opini atau pemikiran juga berubah lantaran hasil kontemplasi (*ta'ammul*) dan mengulang kajian pembelajarannya atau diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Perubahan fatwa, sebagai akibat perubahan pemikiran ini pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Kendati pun bisa dianggap sebagai absurditas hukum Islam, namun hal ini justru menunjukkan fleksibilitas fatwa yang memungkinkan bisa berubah.

Memahami pola pikir seseorang atau lembaga yang memiliki pemikiran organik, tidak mati dan kaku, akan semakin memperkaya kajian keislaman yang variatif yang pada suatu ketika menjadikan Islam semakin mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan segala macam kultur dan sosial di seluruh belahan dunia.

Di antara beberapa tokoh yang memiliki perubahan fatwa akibat perubahan pemikiran keagamaannya adalah Imām al-Shāfi'iy. Sebagaimana lazim diketahui, salah satu keunikan yang dimiliki oleh Imām al-Shāfi'iy adalah keberadaan pendapat beliau yang lama, seringkali disebut dengan *qaul qadīm*, dan pendapat beliau yang baru (*qaul jadīd*).

Istilah Qaul Qadim merujuk pada fatwa atau pendapat Imām al-Shāfi'iy yang disampaikan sewaktu berada di Iraq tepatnya di Baghdad. Saat itu, Imam Shafi'i menyampaikan pendapat keagamaannya melalui lisan juga dan tulisan yang

